

# **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**SEMESTER II**

**2023**

**RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA**

Jln. Pemasarakatan, Desa Kebonagung, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sidoarjo, 30 Desember 2023  
Kepala

Amiek Diah Ambarwati  
NIP 196811251992032001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

F. Pengungkapan Penting Lainnya

VI. Lampiran dan Daftar

**RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA**  
**JL. PEMASYARAKATAN, DESA KEBONAGUNG, KECAMATAN PORONG, KABUPATEN**  
**SIDOARJO**  
**SUREL: [pengelolaan.ruperbaya@gmail.com](mailto:pengelolaan.ruperbaya@gmail.com)**

---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sidoarjo, 30 Desember 2023  
Kepala

Amiek Diah Ambarwati  
NIP 196811251992032001

Laporan Keuangan Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya Triwulan III Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

#### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 3.060.960,- dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 80.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 5.789.021.604,- atau mencapai 100 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 5.815.320.000,-.

#### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 26.607.530.462,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 426.686.851,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 26.001.773.479,-; Piutang Jangka Pendek (neto) sebesar Rp. 0,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 179.070.132,-

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 140.386.139,- dan Rp. 26.467.144.323,-.

#### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 960.960,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 6.784.953.228,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 6.783.992.268,-). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 2.100.000,- dan sebesar Rp. 0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp. 6.781.892.268,-).

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal adalah sebesar Rp. 26.249.011.836,- dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp. 6.781.892.268,-) kemudian ditambah dengan penyesuaian nilai tahun berjalan dan koreksi-koreksi senilai Rp. 0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 7.000.024.755,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp. 26.467.144.323,-.

## **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	80.000	3.060.960	38,26	960.960
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>80.000</b>	<b>3.060.960</b>	<b>0,00</b>	<b>960.960</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2.</b>				
Belanja Pegawai	B.3	3.116.798.000	3.116.077.085	99,98	2.825.978.857
Belanja Barang	B.4	2.698.522.000	2.672.944.519	99,05	2.287.985.560
Belanja Modal	B.5	-	-	0,00	7.062.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>5.815.320.000</b>	<b>5.789.021.604</b>	<b>99,55</b>	<b>5.121.026.417</b>

**RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(DalamRupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	426.686.851	215.685.990
Jumlah Aset Lancar		426.686.851	215.685.990
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	4.309.378.416	3.425.357.116
Gedung dan Bangunan	C.16	26.221.074.261	26.221.074.261
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(4.528.679.198)	(3.482.394.444)
Jumlah Aset Tetap		26.001.773.479	26.164.036.933
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	179.070.132	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		179.070.132	-
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>26.607.530.462</b>	<b>26.379.722.923</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	140.386.139	130.711.087
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.26	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.27	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.28	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		140.386.139	130.711.087
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>140.386.139</b>	<b>130.711.087</b>
<b>EKUITAS DANA</b>			
Ekuitas Dana Lancar	C.29	-	-
Ekuitas Dana Investasi	C.30	-	-
Ekuitas	C.31	26.467.144.323	26.249.011.836
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>		<b>26.467.144.323</b>	<b>26.249.011.836</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>26.607.530.462</b>	<b>26.379.722.923</b>

### III. LAPORAN OPERASIONAL

## RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	960.960	960.960
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>960.960</b>	<b>960.960</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	3.116.077.085	2.825.978.857
Beban Persediaan	D.3	247.399.470	208.665.940
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.150.480.944	1.983.663.027
Beban Pemeliharaan	D.5	163.012.815	175.317.926
Beban Perjalanan Dinas	D.6	76.548.160	124.208.500
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1.031.434.754	966.179.876
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>6.784.953.228</b>	<b>6.284.014.126</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(6.783.992.268)</b>	<b>(6.283.053.166)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.11		
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Nonlancar		-	-
Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/(defisit) Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		2.100.000	-
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(6.781.892.268)</b>	<b>(6.283.053.166)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	D.12		
Pendapatan PNBPN		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(6.781.892.268)</b>	<b>(6.283.053.166)</b>

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2023	2022
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	26.249.011.836	26.819.370.026
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(6.781.892.268)	(4.430.393.129)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANG		-	-
EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN	E.4	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN		-	-
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		-	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.5	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.6	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.7	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.8	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi		-	-
Koreksi Lain-lain		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		7.000.024.755	4.034.506.012
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		218.132.487	(395.887.117)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.9	<b>26.467.144.323</b>	<b>26.423.482.909</b>

## A. PENJELASAN UMUM

### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Pemasarakatan, Desa Kebonagung, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Surabaya mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya berkomitmen dengan visi ***“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

### A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI terdiri dari beberapa modul atau user. SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Salah satunya Modul Persediaan yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### *Basis Akuntansi*

#### **A.3. Basis Akuntansi**

Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### *Dasar*

### *Pengukuran*

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

### *Kebijakan*

### *Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya adalah sebagai berikut:

### *Pendapatan-LRA*

#### **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### *Pendapatan-LO*

#### **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### *Belanja*

#### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## Beban

### (4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## Aset

### (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

## Aset Lancar

### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%

Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

### Aset Tetap

#### b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin

berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

**Penyusutan Aset Tetap**

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa anfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**Piutang Jangka Panjang**

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

**Aset Lainnya**

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang

jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

## *Kewajiban*

### **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## *Ekuitas*

### **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi  
Akuntansi  
Pemerintah  
Berbasis Akrua  
Pertama Kali*

**(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali**

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrua sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrua. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrua pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan, *Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	2.147.085.000	3.116.798.000
Belanja Barang	2.152.522.000	2.698.522.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Belanja Modal		
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.299.607.000</b>	<b>5.815.320.000</b>

*Realisasi  
Pendapatan Rp.  
3.060.960,-*

**B.1 Pendapatan**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp. 3.060.960,- atau mencapai 3826 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 80.000,-. Pendapatan Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya terdiri dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan, Pendapatan dari pemanfaatan BMN Lainnya dan Pendapatan Jasa Lainnya. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
425119 Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	-	-	-
425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	80.000	960.960	1.201,20
425219 Pendapatan Pelayanan dan administrasi Hukum Lainnya	-	-	-
425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	2.100.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>80.000</b>	<b>3.060.960</b>	<b>-</b>

Realisasi Pendapatan TA 2023 sama dengan Realisasi Pendapatan di Tahun 2022

*Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester I TA 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
425119 Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	-	-	0,00
425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	960.960	960.960	0,00
425139 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	-	-	0,00
425219 Pendapatan Pelayanan dan administrasi Hukum Lainnya	-	-	0,00
425912 Pengembalian Belanja Barang TAYL	2.100.000	-	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.060.960</b>	<b>960.960</b>	<b>218,53</b>

*Realisasi Belanja Negara Rp. 5.789.021.604,-*

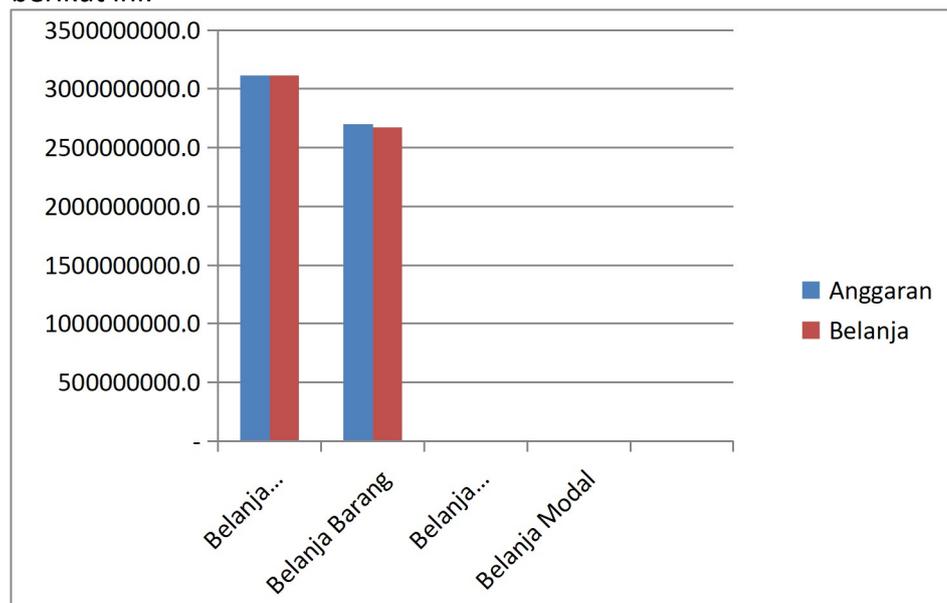
## B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2023 adalah sebesar Rp. 5.789.021.604,- atau 100 persen dari anggaran belanja sebesar Rp. 5.815.320.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023*

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3.116.798.000	3.116.077.085	100
Belanja Barang	2.698.522.000	2.672.944.519	99
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	-	-	-
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>5.815.320.000</b>	<b>5.789.021.604</b>	<b>100</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>5.815.320.000</b>	<b>5.789.021.604</b>	<b>100</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja TA 2023 bertahan di angka maksimal yakni 100%. Belanja Pegawai mengalami peningkatan dikarenakan adanya penambahan jumlah pegawai. Belanja Barang mengalami peningkatan seiring dengan percepatan pertumbuhan ekonomi pasca covid-19, dan Belanja Modal mengalami penurunan dikarenakan tidak ada belanja modal pada tahun 2023.

*Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3.116.077.085	2.825.978.857	10,27
Belanja Barang	2.672.944.519	2.287.985.560	16,83
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	-	7.062.000	17
<b>Jumlah</b>	<b>5.789.021.604</b>	<b>5.121.026.417</b>	<b>13,04</b>

**Belanja Pegawai Rp. 3.116.077.085,-**

**B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.116.077.085,- dan Rp. 2.825.978.857,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 10,27 persen dari TA 2022. Hal ini disebabkan jumlah pegawai yang bertambah.

*Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.103.463.085	2.813.369.857	10,31
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	12.614.000,00	12.609.000,00	-
Belanja Vakasi	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>3.116.077.085</b>	<b>2.825.978.857</b>	<b>10,27</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.116.077.085</b>	<b>2.825.978.857</b>	<b>10,27</b>

*Belanja Barang Rp. 2.672.944.519,-*

**B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.672.944.519,- dan Rp 2.287.985.560,-. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan 16.83 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2022.

Hal ini antara lain disebabkan mulai menurunnya kasus Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi yang mulai berkembang.

*Perbandingan Belanja Barang Semester I TA 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.939.005.284	1.415.489.275	36,98
Belanja Barang Non Operasional	198.368.321	272.863.545	(27,30)
Belanja Barang Persediaan	198.892.060	185.531.000	7,20
Belanja Jasa	182.502.419	176.716.314	3,27
Belanja Pemeliharaan	77.628.275	113.176.926	(31,41)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	76.548.460	124.208.500	(38,37)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>2.672.944.819</b>	<b>2.287.985.560</b>	<b>16,83</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.672.944.819</b>	<b>2.287.985.560</b>	<b>16,83</b>

*Belanja Modal Rp.0,-*

**B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 7.062.000,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami penurunan sampai dengan 100 persen, dikarenakan tidak ada Anggaran untuk Belanja Modal

*Belanja Modal Tanah Rp. 0,-*

**B.5.1 Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Realisasi belanja modal tanah TA 2023 tidak mengalami perubahan dibandingkan TA 2022 disebabkan tidak ada belanja modal tanah di TA 2023 dan TA 2022.

*Belanja Modal  
Peralatan dan  
Mesin Rp. 0,-*

### **B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp. 0,- tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp. 0,-. disebabkan tidak ada belanja modal peralatan dan mesin di TA 2023 dan TA 2022.

*Belanja Modal  
Gedung dan  
Bangunan Rp. 0,-*

### **B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Realisasi Belanja Modal gedung dan bangunan TA 2023 tidak mengalami perubahan dibandingkan TA 2022 disebabkan tidak ada belanja modal gedung dan bangunan di TA 2023 dan TA 2022.

*Belanja Modal  
Jalan, Irigasi, dan  
Jaringan Rp. 0,-*

### **B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Realisasi Belanja Modal TA 2023 tidak mengalami perubahan dibandingkan Realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan tidak ada belanja modal jalan, irigasi dan jaringan di TA 2023 dan TA 2022.

*Belanja Modal  
Lainnya Rp. 0,-*

### **B.5.5 Belanja Modal Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 tidak mengalami perubahan dibandingkan Realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan tidak ada belanja modal lainnya di TA 2023 dan TA 2022.

*Belanja Bantuan  
Sosial Rp. 0,-*

### **B.6 Belanja Bantuan Sosial**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada Semester I TA 2022 tidak mengalami perubahan dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan tidak ada belanja bantuan sosial di TA 2023 dan TA 2022.

*Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp. 0,-*

## **C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

### **C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran*

<b>Keterangan</b>	<b>TH 2023</b>	<b>TH 2022</b>
Uang Tunai	-	-
Bank BRI 650924183641000	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Kas di Bendahara  
Penerimaan  
Rp. 0,-*

## **C.2 Kas di Bendahara Penerimaan**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar masing-masing Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Kas Lainnya dan  
Setara Kas Rp. 0,-*

## **C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Piutang PNBP  
Rp. 0,-*

## **C.4 Piutang PNBP**

Saldo Piutang PNBP per tanggal 30 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- atas pendapatan sewa rumah dinas.

Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

*Bagian Lancar  
Tagihan TP/TGR  
Rp. 0,-*

## **C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar TPA  
Rp. 0,-*

## **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan Piutang  
Tak Tertagih –  
Piutang Lancar  
Rp. 0,-*

## **C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar**

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

*Belanja Dibayar di Muka Rp. 0,-*

### **C.8 Beban Dibayar di Muka**

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp. 0,-*

### **C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

*Persediaan Rp. 426.686.851,-*

### **C.10 Persediaan**

Nilai Persediaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 426.686.851,- dan Rp. 215.685.990,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Persediaan*

<b>Jenis</b>	<b>TH 2023</b>	<b>TH 2022</b>
Uraian Akun Tidak Ada	-	-
Barang Konsumsi	385.686.851	154.353.490
Amunisi	41.000.000	41.000.000
Bahan untuk Pemeliharaan		20.332.500
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>426.686.851</b>	<b>215.685.990</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Tagihan TP/TGR Rp. 0,-*

### **C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan Penjualan Angsuran Rp. 0,-*

### **C.12 Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Penyisihan Piutang  
Tak Tertagih –  
Piutang Jangka  
Panjang  
Rp. 0,-

Tanah Rp. 0,-

Peralatan dan  
Mesin Rp.  
4.309.378.416,-

Gedung dan  
Bangunan  
Rp.  
26.221.074.261,-

### C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

### C.14 Tanah

Nilai asset tanah Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya per tanggal 31 Desember 2023 dan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- .

Hal tersebut terjadi karena Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya tidak memiliki asset berupa tanah.

### C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 4.309.378.416,- dan Rp 3.425.614.866,-. Adapun mutasi tambah maupun kurang nilai Peralatan dan mesin, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	4.309.378.416
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	
Hibah Barang	-
Koreksi tambah	-
Mutasi kurang:	-
Penghentian dari penggunaan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>4.309.378.416</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	(2.168.782.510)
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2023</b>	<b>2.140.595.906</b>

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

### C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 26.221.074.261,- dan Rp. 26.221.074.261,-. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang terhadap Gedung dan Bangunan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	26.221.074.261
Mutasi tambah:	
Pembangunan tambahan ruang kelas	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>26.221.074.261</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(2.359.896.688)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>23.861.177.573</b>

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Jaringan dan  
Irigasi Rp. 0,-*

### **C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	-
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap Lainnya  
Rp. 0,-*

### **C.18 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2022

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	-
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	-

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi Dalam  
Pengerjaan Rp. 0,-*

### **C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap (Rp.  
4.528.679.198,-)*

### **C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing (Rp. 4.528.679.198,-) dan (Rp. 3.482.426.663,-) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.309.378.416	-2.168.782.510	2.140.595.906
2	Gedung dan Bangunan	26.221.074.261	-2.359.896.688	23.861.177.573
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
5	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	0	0	0
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>30.530.452.677</b>	<b>-4.528.679.198</b>	<b>26.001.773.479</b>

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak Berwujud  
Rp. 0,-*

**C.21 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

*Aset Lain-Lain Rp.  
179.070.132,-*

**C.22 Aset Lain-Lain**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 179.070.132,- dan Rp. 0,-.

*Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya Rp. 0,-  
Uang Muka dari  
KPPN Rp. 0,-*

**C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

**C.24 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada  
Pihak Ketiga  
Rp. 140.386.139,-*

**C.25 Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 140.386.139,- dan Rp. 130.711.087,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Utang kepada Pihak Ketiga*

Uraian	Jumlah
Belanja Barang yang masih Harus Dibayar	140.386.139
<b>TOTAL</b>	<b>140.386.139</b>

*Pendapatan yang Ditangguhkan*  
Rp. 0,-

### **C.26 Pendapatan yang Ditangguhkan**

Nilai Pendapatan Ditangguhkan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan pendapatan negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBP, pengembalian belanja, serta pungutan/potongan pajak yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal 31 Desember 2023

*Pendapatan Diterima di Muka*  
Rp. 0,-

### **C.27 Pendapatan Diterima di Muka**

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Pendapatan Diterima di Muka*

Uraian	Jumlah
	-
NIHIL	-
	-
<b>Total</b>	<b>-</b>

*Beban yang Masih Harus Dibayar*  
Rp. 0,-

### **C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar**

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

*Ekuitas*  
Rp.

26.467.144.323,-

### **C. Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 26.467.144.323,- dan Rp. 26.249.011.836,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## **D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

### **D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

*Pendapatan PNBPN*  
Rp. 960.960,-

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 960.960,- dan Rp. 960.960,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2023 dan 2022*

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0		-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	960.960	960.960	-
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	0	-
Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>960.960</b>	<b>960.960</b>	<b>-</b>

*Beban Pegawai Rp. 3.116.077.085,-*

**D.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.116.077.085,- dan Rp. 2.825.978.857,-.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	2.084.099.900	1.876.254.400	11,08
Beban Pembulatan Gaji Pokok PNS	41.979	47.726	(12,04)
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	56.282.578	41.751.858	34,80
Beban Tunjangan Anak PNS	8.755.558	8.987.648	(2,58)
Beban Tunjangan Struktural PNS	27.720.000	27.720.000	-
Beban Tunjangan Fungsional PNS	183.250.000	145.420.000	26,01
Beban Tunjangan PPH PNS	4.178.650	875.385	377,35
Beban Tunjangan Beras PNS	94.218.420	87.048.840	8,24
Beban Uang Makan	631.526.000	591.784.000	6,72
Beban Tunjangan Umum PNS	13.390.000	33.480.000	(60,01)
Beban Uang Lembur	12.614.000	12.609.000	0,04
<b>Jumlah Beban Pegawai</b>	<b>3.116.077.085</b>	<b>2.825.978.857</b>	<b>10,27</b>

*Beban Persediaan Rp. 247.399.470,-*

**D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 133.739.220,- dan Rp. 208.665.940,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan Tahun 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	247.399.470	208.665.940	18,56
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	-
Beban Persediaan Lainnya	0	0	-
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>247.399.470</b>	<b>208.665.940</b>	<b>18,56</b>

*Beban Barang dan Jasa Rp. 2.150.480.944,-*

**D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.150.480.944,- dan Rp. 1.983.663.027,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	54.913.000	125.908.100	0,00
Beban Pengadaan Bahan Makanan	1.580.671.101	1.272.672.135	24,20
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	83.220.000	83.206.000	0,02
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	56.000	0	100,00
Beban honor Operasional Satuan Kerja	50.400.000	50.400.000	0,00
Beban Barang Operasional Lainnya	0	0	100,00
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	#DIV/0!
Beban Bahan	97.183.821	127.329.045	-23,68
Beban Honor Output Kegiatan	0	2.400.000	-100,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	101.184.500	143.134.500	-29,31
Beban Langganan Listrik	164.204.522	162.716.247	0,91
Beban Langganan Telepon	0	0	#DIV/0!
Beban Langganan Air	0	0	#DIV/0!
Beban Jasa Profesi	14.448.000	14.400.000	0,33
Beban Jasa Lainnya	4.200.000	1.200.000	#DIV/0!
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	0	#DIV/0!
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	297.000	-100,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.150.480.944</b>	<b>1.983.663.027</b>	<b>8,41</b>

*Beban Pemeliharaan Rp. 163.012.815,-*

**D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 163.012.815,- dan Rp. 175.317.926,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	28.999.775	64.568.026	-55,09
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48.628.500	48.608.900	0,04
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	85.384.540	62.141.000	37,40
<b>Jumlah</b>	<b>163.012.815</b>	<b>175.317.926</b>	<b>-7,02</b>

*Beban Perjalanan Dinas Rp. 76.548.160,-*

**D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 76.548.160,- dan Rp. 124.208.500,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	43.048.160	75.108.500	(42,69)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	33.500.000	49.100.000	(31,77)
<b>Jumlah</b>	<b>76.548.160</b>	<b>124.208.500</b>	<b>(38,37)</b>

*Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp. 0,-*

**D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

*Beban Bantuan Sosial Rp. 0,-*

**D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 1.031.434.754,-*

**D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.031.434.754,- dan Rp. 966.179.876,-.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	507.013.267	441.758.390	14,77
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	524.421.487	524.421.486	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	100,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	-	-	100,00
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>1.031.434.754</b>	<b>966.179.876</b>	<b>6,75</b>
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Amortisasi</b>	<b>1.031.434.754</b>	<b>966.179.876</b>	<b>6,75</b>

*Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp. 0,-*

*Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp. 2.100.000,-*

**D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

**D.11 Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok Dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp. 2.100.000,- dan Rp. 0,-. Rincian Kegiatan Non Operasional untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022*

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Surplus/(Defisit) Pelepasan aset Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lepas	-	-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Beban Penyelesaian Jangka Panjang	-	-	-
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2.100.000	-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
Defisit Selisih Kurs	-	-	-
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

*Pos Luar Biasa Rp. 0,-*

**D.12 Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Surplus dari Pos Luar Biasa Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

*Ekuitas Awal Rp.  
26,249.011.836,-*

*Defisit LO Rp  
(6.781.892.268)*

*Penyesuaian Nilai  
aset Rp 0,-*

*Penyesuaian Nilai  
Kewajiban Rp. 0,-.*

*Koreksi Nilai  
Persediaan Rp. 0,-*

*Selisih Revaluasi  
Nilai Aset Tetap Rp.  
0,-*

*Koreksi Nilai Aset  
Tetap Non  
Revaluasi (Rp. 0,-).*

## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 26,249,011,836,- dan Rp. 26,819,370,026,-.

### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp (6.781.892.268) dan Rp. (6.283.053.166). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### **E.3 Penyesuaian Nilai Aset**

Penyesuaian Nilai Aset untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Rincian Penyesuaian Nilai Aset untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

#### *Rincian Penyesuaian Nilai Aset*

<b>Penyesuaian Nilai Aset</b>	<b>Semester II TH 2023</b>	<b>2022</b>
		-
<b>Jumlah</b>	-	-

### **E.4 Penyesuaian Nilai Kewajiban**

Penyesuaian Nilai Kewajiban untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

### **E.5 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

### **E.5 Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap**

Selisih atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp. 0,- dan (Rp. 0,-)

### **E.6 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Atas Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan Nilai Aset Non Revaluasi yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi kurang atas beban untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp. 0,-).dan (Rp. 0,-).

*Koreksi Hibah  
Masuk/ Keluar Rp.  
0,-*

*Ekuitas Akhir Rp.  
26.467.144.323,-*

#### **E.7 Koreksi Hibah Masuk/Keluar**

Koreksi Atas Hibah Masuk/Keluar merupakan pencatatan atas hibah masuk/keluar berupa hibah barang. Koreksi pencatatan aset tetap untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

#### **E.7 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 26.467.144.323,- dan Rp. 26.249.237.367,-.

### **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

#### **F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Tidak ada kejadian penting Setelah Tanggal Neraca.

#### **F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

Tidak ada pengungkapan lain-lain.



